



KETIKA NEGARA MEMBERI AMANAH



PUSAT DATA DAN INFORMASI PEREMPUAN RIAU



TIM REDAKSI

Penanggung Jawab Ketua Umum Pusdatin Puanri

- ✿ Septina Primawati Rusli

Penyunting

- ✿ Rahmita Budiartiningsih
- ✿ Wilaela
- ✿ Rita Anugerah
- ✿ Yenita Roza

Penyunting Pelaksana

- ✿ Qomariah Lahamid

Tim Penulis

- ✿ Anggia Kargenti Evanurul Maretih
- ✿ Ellyan Sastraningsih
- ✿ Lapeti Sari
- ✿ Leny Nofianti
- ✿ Nurul Qomariah Agustini
- ✿ Rahmita Budiartiningsih
- ✿ Riswani
- ✿ Wilaela

Pengumpul Bahan

- ✿ Zulhaida

Sekretariat

- ✿ Firda Yanti
- ✿ Intan Hairani



DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ☉ TIM REDAKSI | ii |
| ☉ DAFTAR ISI | iii |
| ☉ SAMBUTAN | |
| - IBU NEGARA REPUBLIK INDONESIA | v |
| - MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI | viii |
| - GUBERNUR RIAU | x |
| ☉ SEKAPUR SIRIH KETUA UMUM PUSDATIN PUANRI | xii |
| ☉ PENDAHULUAN | 1 |
| ☉ LINDA AMALIA SARI GUMELAR | 9 |
| ☉ MEUTIA FARIDA HATTA SWASONO | 43 |
| ☉ SRI REDJEKI SUMARJOTO | 73 |
| ☉ KHOFIFAH INDAR PARAWANSA | 97 |
| ☉ TUTTY ALAWIYAH AS | 121 |
| ☉ MIEN SUGANDHI | 153 |
| ☉ A SULASIKIN MURPRATOMO | 183 |
| ☉ LASIJAH SOETANTO | 217 |
| ☉ TESTIMONI | 243 |
| ☉ TENTANG PENULIS | 255 |



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RI
KABINET PERSATUAN NASIONAL
(1999 – 2001)**



Si Pemberani

Khofifah Indar Parawansa lahir di Kota Surabaya pada tanggal 19 Mei 1965, dari pasangan Achmad Ra'i (Alm) dan Hj. Rochmah. Khofifah menghabiskan masa kecil hingga remaja pada tiga kampung di Surabaya, yaitu Jemur Wonosari, Jemur Ngawinan, dan Wonokromo. Suasana kehidupan di kampung yang tenang, nyaman, rukun dan asri menyebabkan Khofifah selalu merasa dekat dengan lingkungannya.

Jiwa pemberani Khofifah sudah kelihatan sejak masa kecilnya, bahkan keberaniannya mengalahkan laki-laki seusianya saat itu. Khofifah punya kebiasaan yang sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh laki-laki, yaitu setiap pulang sekolah ia bersama teman-teman laki-laki terjun ke sungai di Jemur untuk mencari kerang air tawar. Menariknya, kedua orang tuanya tidak melarang Khofifah pergi bermain-main di sungai. Namun, kedua orang tuanya tetap memberikan batasan. Saat sore menjelang magrib, ia harus sudah berada di rumah untuk mengaji. Ia dididik oleh kedua orang tuanya untuk selalu shalat tepat waktu dan mengaji setiap hari. Orang tuanya telah menanamkan perlunya manajemen waktu dilatih sejak kecil.

Khofifah sejak kecil memang dididik dengan disiplin oleh kedua orang tuanya, terutama dalam bidang ilmu agama. Ditambah lagi dari Taman Kanak-kanak hingga sebelum masuk Fakultas Ilmu Politik Universitas Airlangga, kehidupan Khofifah sepenuhnya berada di lingkungan pesantren, hal ini membentuk Khofifah menjadi pribadi yang tangguh, disiplin dan sederhana.

Mengenyam Pendidikan

Khofifah memulai pendidikan sekolah dasar pada tahun 1972 di SD Taquma Jemur Ngawinan. Pada tahun 1978 Khofifah menamatkan bangku sekolah dasar dan melanjutkan ke SMP Khodijah di Wonokromo. Kemudian melanjutkan ke SMA Khodijah pada tahun 1981 yang juga berlatar belakang agama Islam dan pesantren. Ketika memasuki jenjang kuliah, Khofifah mengambil kuliah di dua universitas, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya dan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya. Kebiasaan kuliah di dua universitas ini banyak diikuti oleh keponakan-keponakannya sampai sekarang di Surabaya. Kemudian pada tahun 2008 Khofifah melanjutkan kuliahnya di Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Jakarta.

Di bangku sekolah Khofifah sangat menyukai mata pelajaran matematika, bahkan sampai ke anak-anaknya pun menyukai mata pelajaran tersebut. Hal ini disebabkan karena mata pelajaran tersebut sangat menyenangkan baginya. Khofifah yang di nilai cerdas kerap kali diminta untuk mengajar teman-temannya apabila guru berhalangan hadir, terutama pada mata pelajaran *Nahwu Shorof* dan *Qiro'ah*. Kebiasaan ini terjadi ketika Khofifah menduduki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan gurunya yang bernama Ibu Nurzalinab, yang juga merupakan guru favoritnya. Di samping guru-guru favorit lainnya seperti Ustad Idris (alm) di bangku sekolah dasar pada saat itu sebagai kepala sekolah sekaligus guru agama, Tafrali (alm) guru Biologi di bangku sekolah menengah pertama dengan kesan keras dan tegasnya, Endah Nizar guru Bahasa Arab, Ustad Athurham (alm) guru SMA yang lembut, dan guru *Nahwu Shorof* dan *Qiro'ah*.

Berumah Tangga



Khofifah bersama keluarga ketika Umroh

Perkenalan Khofifah dengan suaminya Ir. H. Indar Parawansa, M.Si yang berasal dari Makassar setelah ia masuk DPR. Khofifah merasa diuntungkan karena suaminya yang bekerja sebagai PNS Departemen Dalam Negeri ini sudah mengetahui dari sebelum menikah dia berkawan dengan siapa, dan bagaimana aktivitasnya yang tidak mengenal waktu, sehingga suaminya bisa menerimanya apa adanya termasuk aktivitas di partai. Menurutnya komitmen itu sangat penting, terlebih lagi aktivitasnya yang tidak mengenal waktu.

Di awal pernikahan Khofifah merasa tidak terlalu dibebani oleh kewajiban mengurus suami, meskipun suaminya berdarah biru dan sangat

Bersama suaminya Khofifah dikaruniai empat orang anak, masing-masing Fatimahsang Mannagalli Parawansa usia 19 tahun, duduk di bangku kuliah di Melbourne. Jalaluddin Mannagalli Parawansa usia 17 tahun dan kuliah di Beijing. Yusuf Mannagalli Parawansa usia 15 tahun duduk di bangku sekolah di *Labs School* dan terakhir Ali Mannagalli Parawansa usia 12 tahun, duduk di bangku kelas enam Sekolah Dasar.

Dalam kehidupan berumah tangga ada peristiwa yang sangat berkesan dialami Khofifah, yaitu ketika pertama-tama PKB terbentuk. Khofifah sering meninggalkan rumah bahkan tidak pulang ke rumah untuk beberapa hari. Anaknya pernah sampai tidak mengenali ia ketika bertemu. Saking sibuknya, suatu saat pada tahun 1998 Khofifah pernah diprotes oleh anaknya yang bernama Fatimahsang Mannagalli Parawansa, pada waktu itu berumur 5 tahun dikarenakan ia tidak bisa pulang hingga 20 hari lamanya. Bentuk protes anaknya itu dengan menulis di tembok tulisan besar-besar "Ibu pulanglah, bubarkan saja partainya". Kejadian tersebut sangat menyentuh hatinya, sampai akhirnya untuk beberapa hari ia membatalkan kegiatan kerjanya. Khofifah paham dengan perasaan anaknya, dengan lembut Khofifah berusaha mencoba memberikan pengertian kepada anak-anaknya tentang kesibukannya, dengan cara mengajak anaknya melihat langsung aktivitasnya di luar rumah, hingga akhirnya anaknya paham betul dengan kesibukan ibunya di luar rumah.

Hingga kini dengan kesibukan yang tinggi, Khofifah berusaha untuk selalu menjaga komunikasi dengan keluarganya. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan selalu menjadwalkan hari libur keluarga dan pulang lebaran Idul Fitri sekeluarga ke Surabaya. Khofifah sangat memanfaatkan waktu selama liburan terutama dalam perjalanan. Khofifah sengaja untuk tetap menggunakan jalan darat ketika pulang lebaran ke Surabaya agar dapat lebih banyak bercengkrama dan berdiskusi bersama keluarga.

Sang Pecinta Alam

Semasa kuliah di Unair, Khofifah aktif sebagai anggota Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam (Impala). Patut diketahui, selama aktif sebagai aktivis pecinta alam, ia sudah menaklukkan hampir semua gunung di Jatim, termasuk Gunung Klotok, Kelud, dan Semeru. Khofifah mempunyai pengalaman yang tidak dapat terlupakan ketika mendaki, terutama Gunung Semeru. Ia mengatakan, jika bergabung dengan rombongan mendaki gunung, ia selalu berjalan terdepan, dan seringkali meninggalkan teman-temannya karena derapnya yang cepat.

Karena pengalaman-pengalamnya itu, di kampus ia dikenal sebagai sosok pecinta alam suka tantangan. Baginya, seorang pecinta alam akan selalu tertantang untuk dapat menaklukkan gunung-gunung yang menjadi tujuannya. Dalam pendakian tersebut kesulitan medan adalah tantangan tersendiri yang sangat menarik dan mendatangkan kepuasan ketika dilalui. Seorang pendaki tidak akan menghentikan petualangannya selama masih ada puncak-puncak yang belum pernah ditaklukkan.

Mencapai puncak gunung dengan segala tantangan membuat pribadi Khofifah tahan banting. Dalam menjalankan tugas apapun, ia selalu tertantang mencapai sukses di puncak. Dalam banyak hal, ia selalu optimis meraih keberhasilan, meskipun banyak orang yang menilai puncak yang dipilihnya tidak realistis, tidak mungkin tercapai. Selain dikenal sebagai pendaki gunung, perempuan cerdas dan berani ini ternyata mantan pemain hoki hingga sekarang gemar dengan sepakbola.

Kegiatan Berorganisasi

Kegiatan berorganisasi sudah dimulai Khofifah sejak kelas 3 SD di kampung Jemur Ngawinan, sebagai bendahara kelompok pengajian. Ibunya mengajarkan cara mengelola keuangan. Bagaimana agar uang itu bisa dibelikan alat-alat pendukung pengajian, seperti piring, gelas dan tikar. Dari

mempunyai perlengkapan yang lengkap. Khofifah juga aktif mengadakan kegiatan-kegiatan lainnya bersama teman-temannya, seperti mengadakan perlombaan-perlombaan di desa. Bagi Khofifah "*learning by doing*", dimulai dari desa. Ketika masih di sekolah dasar, Khofifah sering menjadi pembawa acara, dan di bangku SMA Khofifah sering menjadi penceramah. Setiap pidato ada pesan yang disampaikan, yang selalu diambil dari Al-Qur'an hingga sekarang.

Saat masih duduk di kelas satu SMA, Khofifah sudah terbiasa mengikuti diskusi dan seminar. Dari forum-forum ilmiah itulah Khofifah tumbuh menjadi pribadi yang matang. Kebiasaan bicara ceplas ceplos apa adanya, membuat Khofifah tidak takut terhadap risiko yang akan dihadapi atas pernyataan-pernyataan yang dilontarkannya. Hal ini disebabkan Khofifah tidak asal bicara, ia menguasai masalah yang dipersoalkan. Jiwa kepemimpinannya pun sudah tampak ketika di bangku sekolah. Hal ini terbukti ketika Khofifah menjadi ketua OSIS SMA Khodijah, SMA tersebut tiga kali juara umum (lomba antar-SMA) mengalahkan sekolah umum dan sekolah lainnya. Di sekolah tersebut terdapat beberapa pengurus yayasan dan guru yang terlibat politik Nahdatul Ulama (NU) sehingga sosialisasi kepemimpinan dalam berorganisasi relatif baik. Diharapkan lulusan mempunyai kepekaan sosial dan kemampuan berorganisasi relatif tinggi.

Pengalaman organisasi di bangku SMA dimulai ketika ia dipilih menjadi Ketua Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Jawa Timur. Setelah tamat SMA, ia melanjutkan studinya dengan mengambil Jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga (Unair), perguruan tinggi yang cukup terkenal yang terletak di Surabaya. Duduk di bangku kuliah, jiwa aktivis Khofifah terus tumbuh berkembang. Ia kemudian bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) dan ikut Unit Kegiatan Mahasiswa Pecinta Alam di kampusnya, serta aktif di dunia dakwah kampus.

Perjalanan aktivitas organisasi Khofifah masih terus berkiprah sampai sekarang. Setelah menjadi Ketua Cabang IPPNU Jawa Timur, pada

Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Surabaya, Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya pada tahun 1987-1988, tahun 1987-1989 sebagai Ketua Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Surabaya, Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tahun 1990. Ketua Biro Lingkungan Hidup Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Timur pada tahun 1992, Wakil Sekretaris Gerakan Muda Persatuan pada tahun 1990-1995, Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 1995-1997, Kepala Bidang Ekonomi Koperasi Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama pada tahun 1995-2000, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 1998-2000.

Selanjutnya pada tahun 1998-2001 Khofifah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Gerakan Masyarakat Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Sekarang Khofifah masih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama di samping juga menjadi Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia dan Wakil Ketua Nasional Demokrat.



Sejak itu ia terus terlibat dalam organisasi dan politik. Pemilu 1992 membawanya ke Senayan mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan karena kemampuannya pula ia diangkat sebagai Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan DPR. Tahun 1995 ia diangkat sebagai Ketua Pimpinan Komisi VIII untuk kemudian pindah menjadi anggota Komisi II (1997-1998). Menjelang Pemilu 1999 ia mengundurkan diri dari PPP dan masuk menjadi salah seorang Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang juga membawanya ke Senayan. Pada tahun 2000 ia terpilih sebagai Ketua Muslimat NU periode 2000-2005 yang mengharuskan ia mengundurkan diri dari Ketua DPP PKB. Dalam kabinet Abdurrahman Wahid yang terbentuk Oktober 1999, ia pun diangkat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia.

Sederetan panjang pengalaman pekerjaanpun telah dilalui oleh Khofifah dimulai tahun 1989 sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Taruna, Surabaya, Dosen Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI, Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Anggota Komisi II DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI hingga menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Sekarang Khofifah aktif di Dewan Koperasi Indonesia, Muslimat Nahdlatul Ulama dan lembaga pendidikan "Khodijah" di Surabaya. Lembaga pendidikan "Khodijah" tersebut sekarang sudah memiliki 2600 orang siswa dengan guru sebanyak 280 orang, dari pendidikan play grup hingga SMA.

Meski tiap hari disibukkan dengan aktivitas politik, Khofifah tetap pandai mengatur waktu. Walaupun Khofifah tidak menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan lagi, Khofifah tetap getol bicara isu perempuan di berbagai daerah.

Pidato Monumental

Nama Khofifah mulai populer di panggung nasional setelah membacakan pidato sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam SU MPR 1998. Pidato Khofifah itu sangat monumental karena merupakan pidato kritis pertama terhadap Orde Baru di ajang resmi selevel Sidang Umum MPR. Khofifah berbicara kritis, ia mengkritik Pemilu 1997 yang penuh kecurangan. Perempuan cerdas itu melontarkan ide-ide demokratisasi. Dia juga berbicara lantang seperti para mahasiswa yang marak demonstrasi di jalan. Mungkin Khofifah masih terbawa oleh suasana sebagai mahasiswa. Maklum saat itu umurnya masih muda 33 tahun. Pidato Khofifah memang sangat monumental. Para anggota MPR yang didominasi Fraksi Karya Pembangunan (Golkar), Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan terperanjat dengan pidato yang menohok jantung Orde Baru itu.

Fraksi yang paling terkejut adalah Fraksi ABRI. Maklum, yang dibacakan Khofifah sangat berbeda dengan naskah yang diterima oleh Cilangkap (Mabes ABRI) dari FPP. Di era Orba semua pidato di depan institusi resmi atau di depan publik terlebih dahulu diserahkan ke Cilangkap. Setelah ditunjuk menjadi juru bicara FPP, perempuan kelahiran Surabaya itu menerima naskah pidato resmi. Salinan pidato itu juga diserahkan ke Cilangkap. Khofifah mempunyai kebiasaan selalu membaca berulang-ulang sebelum tampil di muka umum. Bahkan, di rumahnya pun ia membuat simulasi. Isi pidatonya memang memuji-muji pemerintah Soeharto.

Sebelum dibacakan di depan MPR, naskah itu juga dibaca secara resmi dalam forum internal anggota FPP. Di depan koleganya itu, suara Khofifah tak keluar. Sejumlah anggota FPP langsung mengusulkan agar Khofifah diganti. Namun, beberapa tokoh senior FPP saat itu, seperti Yusuf Syakir dan Hamzah Haz, tetap mempertahankan Khofifah. Lantas, Khofifah diajak bertemu dengan Ismail Hasan Metareum (ketua umum PPP) waktu itu.

Khofifah ditanya apa yang menyebabkan suaranya tak keluar. "Isi naskah tak sesuai dengan hati nurani saya," jawab Khofifah. Ia tidak sreg dengan pidato yang memuji Orba itu. Kemudian, para pemimpin PPP memutuskan merombak naskah pidato tersebut biar suara Khofifah keluar. Urusan merombaknya pun diserahkan kepada yang membaca. Kemudian akhirnya Khofifah langsung merombaknya sesuai hati nuraninya. Saat naik ke podium sidang umum MPR Khofifah begitu percaya diri, ia berbicara dengan lantang. Mengkritisi gaya pemerintah yang mengekang demokratisasi. Mengungkit pemilu yang berada dalam kekangan pemerintah.

Para penonton televisi di rumah yang saat itu sudah dijangkiti sikap apatis terhadap Orba pun bertepuk tangan. Televisi diperbolehkan siaran langsung karena salinan pidato Khofifah sudah diserahkan ke Cilangkap. Tapi, kenyataannya, pidato yang dibacakan perempuan lulusan Unair itu berbeda dengan yang berada di tangan para Jenderal. Turun dari panggung pidato, Khofifah disambut senyum kecut oleh para petinggi F-KP dan F-ABRI yang duduk di depan. Bahkan, sejumlah Jenderal langsung menegurnya karena mengungkit-ungkit pemilu yang telah berlalu.

Pidato Khofifah itu menjadi catatan sejarah, yang merupakan pidato pada forum formal yang secara terbuka mengkritik rezim Soeharto yang tengah berkuasa saat itu. Pidato inilah yang mengangkat Khofifah menjadi politikus yang disegani di tanah air.

Menjadi Menteri



Jajaran Menteri Kabinet Persatuan Nasional (1999 – 2001)

Menjadi menteri yang serba bisa dan dipercayakan mengurus banyak kegiatan pada pemerintahan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menambah sederetan panjang prestasi Khofifah. Bahkan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengatakan, seandainya terjadi sesuatu pada Sekretaris Negara Ali Rahman, maka Khofifah yang akan mengantikannya. Pada tahun 2000 Khofifah mewakili Kepala Negara berpidato di podium Kepala Negara pada United Nation (PBB) di Beijing, ia menjadi satu-satunya orang yang bukan kepala negara berpidato di podium terhormat tersebut. Begitu besar kepercayaan dan apresiasi yang diberikan pemerintahan pada saat itu kepadanya.



Khofifah berpidato di Podium Kepala Negara pada United Nation (PBB) Tahun 2000

Sebelum Khofifah menjadi menteri, ia mengajukan gagasan perubahan paradigma nama kementerian, semula kementerian menggunakan istilah Peranan Wanita menjadi Pemberdayaan Perempuan. Karena urusan pemberdayaan perempuan seharusnya menjadi urusan masyarakat bukan negara seperti juga kementerian sosial dan penerangan. Negara selalu cenderung memanipulasi perempuan ini untuk tujuan-tujuan politik sesaat. Itulah yang terjadi di era Orde Baru.

Akan tetapi ketika Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memintanya untuk memegang jabatan ini, ia harus mempertimbangkan kembali lintasan pikirannya itu. Akhirnya ia memang menerimanya tetapi dengan syarat perubahan paradigma dan perubahan nama kementerian itu sendiri. Tentu saja bagi Abdurrahman Wahid yang gemar dengan sesuatu yang baru dan progresif, gagasan Khofifah ini diterima sebagai bagian dari reformasi Indonesia. Keberadaan kementerian ini dianggapnya sebagai fasilitasi dan transisi menuju kesetaraan perempuan dan keadilan yang sebenarnya. Konsekuensi dari perubahan cara pandang ini tentu saja di satu pihak harus ada upaya perubahan radikal dalam visi-misi dan program, dan di lain pihak harus pula ada masa transisi yang tidak mudah pula untuk dilalui.

Ketika menjabat sebagai menteri, Khofifah merubah kementerian yang sebelumnya bernama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (Meneg UPW) menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP). Perubahan nama ini tidak hanya dimaksudkan perubahan nama, tentu saja melainkan menurut klaimnya sendiri juga mengikutkan perubahan paradigma dalam memandang perempuan. Mengubah paradigma pandangan terhadap perempuan dari Orde Baru yang menempatkan perempuan sebagai pendamping suami ke kesejajaran gender dan keadilan. Perubahan paradigma tersebut mengharuskan adanya visi yang baru dalam kantor yang dipimpinnya itu, yaitu, "kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara". Sebuah pendekatan yang boleh dibilang holistik, yaitu menempatkan perempuan dalam arus utama (*mainstream*) perjalanan masyarakat itu sendiri di segala bidang. Maka lahirlah misi, yakni "peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang strategis; penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender; penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; penegakan HAM bagi perempuan dan kemampuan serta peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan."

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) di sini berarti bahwa program-program pemberdayaan perempuan pemerintah tidak bersifat sektoral keperempuanan atau kewanitaan melainkan bersifat menyeluruh. Jadi,

dalam bahasa para feminis, gender bukan sebagai sektor dalam pembangunan melainkan sebagai perspektif dalam cara berpikir dan perjalanan masyarakat atau program-program pembangunan itu sendiri. Kemudian Khofifah mencanangkan kebijakan satu pintu (*one door policy*), semua kebijakan tentang perempuan dikeluarkan melalui kementerian PP ini. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan sektor dan daerah, perempuan bukan sebagai program tersendiri dalam pembangunan itu melainkan menjadi bagian dari proses sejak awal perencanaan hingga evaluasi dan hasil akhir. Untuk merealisasikan program ini, Khofifah menyusun sebuah program yang menyeluruh sebagai upaya transisi menuju kesetaraan gender dan keadilan yang sebenarnya. Program-program tersebut adalah pendidikan dan pelatihan, kesehatan, keluarga berencana, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan hukum, kesejahteraan dan agama, lingkungan hidup, informasi dan komunikasi, dan kelembagaan.

Khofifah juga mencanangkan membentuk Biro Pemberdayaan Perempuan di semua tingkatan pemerintahan, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Unit kerja ini mengemban visi untuk “memberdayakan perempuan baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam proyek pembangunan, serta memiliki posisi politik tingkat eselon birokrasi yang kuat”. Sedangkan misi dari unit kerja ini antara lain adalah, meningkatkan status perempuan, menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan menghapuskan tindak kekerasan terhadap perempuan menuju kesetaraan gender dan keadilan. Juga, mengembangkan partisipasi masyarakat dan organisasi perempuan, melakukan berbagai advokasi, meningkatkan kesadaran gender, serta memantapkan dan meningkatkan budi pekerti dan akhlak mulia dalam keluarga dan masyarakat menuju terwujudnya kemandirian bangsa.

Namun bagi Khofifah untuk merealisasikan semua rencana di atas memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. *One door policy* maupun usaha untuk mendirikan biro pemberdayaan perempuan di setiap tingkatan pemerintahan mendapat tantangan dari para birokrat itu sendiri dengan berbagai alasan. Salah satu alasan adalah kebiasaan di masa lalu, di mana perempuan dijadikan objek proyek para pejabat dan birokrat akibat

dari ditematkannya perempuan sebagai sektor dalam setiap program. Dengan demikian sektor perempuan dalam program itu sama dengan eksploitasi perempuan. Alasan lain penolakan pembentukan biro PP, umumnya juga karena organisasi yang ada sudah terlalu “gemuk”.

Menurut Khofifah cukup banyak di antara para birokrat yang menolak pembentukan biro pemberdayaan perempuan (PP) sebagai wadah pelaksana Agenda Pokok Nasional (APN) Pembangunan Peranan Perempuan. Sedikit sekali dari birokrat yang punya sensitif gender. Tanpa pembentukan Biro PP, menurut Khofifah program yang dibuat untuk pemberdayaan perempuan akan sulit dioperasionalkan. Hal ini disebabkan pembicaraan yang berlangsung dalam setiap koordinasi dengan berbagai pihak, biasanya tidak nyambung. Lima Agenda Pokok Nasional dimaksud adalah pertama, pemberdayaan perempuan dalam tiga bidang strategis yakni pendidikan, kesehatan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya pembangunan. Kedua, kesetaraan dan keadilan gender. Ketiga, penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Keempat, penghormatan atas martabat dan hak asasi manusia bagi perempuan. Kelima, kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan perempuan dan aktivitas lanjutnya.

Khofifah menegaskan bahwa strategi pembangunan pemberdayaan perempuan salah satunya adalah pembangunan nasional berperspektif gender, yakni semua kebijakan pembangunan sektor dan daerah diupayakan berperspektif gender dan harus dapat memberikan kontribusi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu, semua pihak khususnya para perumus kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di berbagai sektor, perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuannya tentang pengutamaan gender.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian Khofifah ketika ia menjabat sebagai menteri adalah masalah *Trafficking*. Masalah ini tidak mendapat respon dari semua pihak. Khofifah mempunyai data yang lengkap tentang *trafficking* di Indonesia. Data tersebut diperolehnya dari kunjungannya ke Bangkok, berasal dari NGO disana. Setiap melakukan

kunjungan ke provinsi ia membawa data *trafficking* tersebut lengkap dengan nama, umur, asal dan sebagainya. Setiap turun ke daerah, Khofifah memberikan data *trafficking* tersebut kepada wakil gubernur yang bersangkutan sebagai koordinasinya di daerah. Ketika ia ke Riau pada saat itu, ia juga menyerahkan langsung data *trafficking* tersebut, kebetulan wakil gubernur pada saat itu adalah Rustam Abrus. Khofifah memberikan apresiasi kepada wakil gubernur tersebut, karena langsung merespon masalah yang dikemukakannya. Hal ini dibuktikan dengan langsung diturunkan aparat untuk melihat langsung kejadian di lokasi, hingga diperoleh hasil bahwa dari 1900 orang tersebut, dapat dipulangkan ke daerah asalnya sebanyak 900 orang.

Masalah birokrat dan militer juga menjadi perhatian khusus Khofifah. Dengan tegas Khofifah mengatakan bahwa pertama-tama yang harus dilakukan adalah penyadaran kepada birokrat dan militer tentang sensitif gender. Karena hanya dengan itu kebijakan dan program akan berjalan dengan baik. Militer dilihat sebagai faktor penting terjadinya kekerasan terhadap perempuan baik oleh negara maupun oleh aparatnya. Berbagai tragedi seperti peristiwa 13-14 Mei 1998 dan Aceh serta peristiwa-peristiwa lainnya selalu menyertakan militer sebagai aktor kekerasan terhadap perempuan. Khofifah juga menuntut agar rekomendasi TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) atas kasus 13-14 Mei 1998 tentang pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan tetap diproses dan dituntaskan. Ia meminta dan bersama-sama dengan polisi untuk menuntaskan berbagai kekerasan terhadap perempuan tersebut.

Dalam Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan Masyarakat Indonesia untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Pencanangan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan melalui Kemitraan Negara dan Masyarakat (RAN PKTP) ada enam bidang strategis yang memerlukan penanganan mendesak, yaitu masalah hukum dan perundang-undangan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, media massa, dan militer. Komitmen bersama ini dilakukan dengan tiga target utama. Pertama, RAN PKTP diharapkan dapat memunculkan kesetaraan dan keadilan gender dengan prinsip anti

kekerasan. Kedua, agar kebijakan dan pelaksanaan yang dibuat semua pihak dapat responsif dan memiliki sensitif gender. Ketiga, agar di masyarakat dan pemerintah ada perubahan sikap dan tingkah laku.

Khofifah menyadari bahwa untuk melaksanakan misi itu semua tidak mudah, dan ia tidak harus memulai dari nol besar, karena perjalanan Bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan cukup strategis dalam peran publik. Dengan mengutip berbagai angka statistik keterlibatan perempuan dalam berbagai kelembagaan negara sejak awal negara ini berdiri, Khofifah mengatakan bahwa itu bisa dijadikan sebagai salah satu modal di samping apa yang sudah dicapai di masa Orde Baru, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan sebagainya.

Sehingga menurut Khofifah perjuangan atau gagasan *mainstreaming* kesetaraan gender dan keadilan tidak berat-berat amat. Menurut ia masalahnya adalah bahwa perkembangan posisi dan peran politik perempuan demikian lamban karena berbagai faktor. Antara lain adalah ketidakadilan yang lahir akibat dari kesenjangan antara hak politik dan peran politik yang mereka perjuangkan karena faktor budaya. Budaya yang *patriarkhal* menempatkan perempuan sebagai *subordinasi* lelaki dan meskipun ada peran ganda ternyata belum memutuskan pengaruh budaya yang kuat ini, untuk tidak dikatakan semakin memberatkan perempuan itu sendiri. Misalnya tentang konsep peran ganda perempuan. Pada gilirannya, pola pikir ini menempatkan jenis kelamin sebagai pertimbangan yang sangat berpengaruh dalam menentukan status sosial, kedudukan dan posisi seseorang.

Selanjutnya menurut Khofifah organisasi-organisasi perempuan bisa dijadikan modal yang sangat kuat bagi perjuangan tersebut dengan syarat ada usaha mendorong lebih maju peran mereka. Ada sejumlah organisasi perempuan yang telah menggunakan pendekatan partisipatif dengan memberikan ukuran-ukuran objektif seperti kapabilitas dan kapasitas dalam peran dan jabatan atau kepemimpinan, tetapi masih lebih banyak yang menggunakan organisasi perempuan sebagai alat mobilisasi, misalnya karena kedudukan suaminya sebagai kepala kantor. Pola

partisipasi dalam organisasi perempuan pun masih menghadapi sejumlah kendala untuk kesetaraan gender seperti masalah terbatasnya SDM dan begitu kuatnya lelaki dalam sektor publik tersebut. Dan akhirnya memang harus ada *political action* di mana kebijakan-kebijakan publik lebih sensitif gender.

Kepada pekerja perempuan yang di deportasi dari Singapura dan Malaysia yang jumlahnya semakin bertambah pada saat itu, Khofifah meminta adanya Kerja sama PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dengan instansi terkait dan pihak pemerintah daerah (dalam hal ini Kota Batam). Karena masalah sosial itu bila berlarut-larut tidak tertangani akan memperburuk situasi di pulau tersebut, yang menjadi kawasan industri dan pariwisata. Khofifah juga menegaskan apabila penempatan TKI tersebut melalui prosedur ilegal, diharapkan instansi terkait dalam masalah sosial ini dapat pula turun tangan.

Peristiwa penting yang dialami Khofifah ketika menjadi menteri pada tahun 2001 tepatnya di bulan Juni, yaitu ketika bertemu dengan keluarga Raja Saudi Arabia Syekh Kamal dengan rombongan. Pada saat itu juga dihadiri oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko EKUIN) Kwik Kian Gie, Khofifah menyarankan agar dibuat "*Bilateral Agreement*" yang bertujuan membangun negara Indonesia bisa setara dengan negara lain, dan dapat mengatasi masalah-masalah TKI. Ide ini mendapat dukungan dari Gus Dur, tetapi belum sempat hal tersebut terealisasi, Gus Dur lengser. Beberapa bulan berikutnya, ternyata Filipina telah secepatnya merealisasikan "*Bilateral Agreement*" tersebut. Khofifah menegaskan bahwa harus ada perlindungan (payung hukum) untuk mengatasi masalah TKI/TKW tersebut, agar permasalahan yang selama ini terjadi dapat di atasi. Khofifah mengharapkan idenya ini dapat direalisasikan untuk mewujudkan negara yang baik dan bertanggung jawab.

Untuk masalah Pekerja Seks Komersial (PSK), Khofifah meminta tim dokter untuk turun langsung ke lokasi, membantu masalah kesehatan di sana. Khofifah menegaskan perlunya membangun pendidikan

tercipta masyarakat madani. Selanjutnya Khofifah mengemukakan bahwa hal ini sesuai dengan Surat At - taubah:122 dalam Al-Qur'an mengenai *diversifikasi* profesi, bahwa ada golongan yang melakukan pendalaman agama dan mengingatkan umat, hingga tercipta negara yang baik.

Satu hal menurut Khofifah yang perlu dicermati dari amanah yang diberikan kepadanya sebagai menteri adalah bahwa ia sebagai "pemberi pelayanan" kepada masyarakat dan "bagaimana membuat orang lain tersenyum". Prinsip inilah yang menyebabkan Khofifah disukai oleh banyak orang dari berbagai kalangan.

Kuantitas dan Kualitas

Terhadap pemikiran mengenai pandangan orang Indonesia, Khofifah beranggapan bahwa "setiap daerah memiliki kearifan lokal, kearifan lokal tersebut bisa menjadi kearifan nasional". Misalnya saja pada buku yang dikarang oleh Tenas Effendi dari Riau yang berjudul "Tunjuk Ajar Melayu", isinya sangat banyak mengandung nilai-nilai yang sangat bagus apabila dibaca oleh masyarakat. Isi buku tersebut bisa diajarkan kesemua orang. Hingga ada kearifan lokal yang bisa menjadi kearifan nasional.

Menurut Khofifah perempuan masa lalu setara dengan perempuan sekarang pada tataran keterwakilan perempuan di era itu tentang kemerdekaan bahkan sangat luar biasa. Seperti pejuang dari Aceh, yang menjadi komandan adalah perempuan. Dalam perspektif perempuan, mereka mampu memimpin dan berjuang untuk kemerdekaan. Tetapi hal yang sangat di sayangkan adalah sangat sulit untuk memberi gelar pahlawan bagi perempuan, seperti "Malahayati" sampai saat ini belum terealisasi, tidak diketahui apa yang menjadi kendala. Jadi pada perempuan masa lalu, dilihat dari sisi "kualitas", berbeda dengan perempuan masa sekarang yang lebih dilihat dari sisi "kuantitas". Misalnya saja sekarang sudah mulai banyak perempuan yang menduduki posisi pengambil kebijakan, dan keterwakilan 30% bagi perempuan di bidang politik.

Mengenai Pendidikan Generasi Muda, Khofifah berpandangan bahwa secara kualitatif diperlukan "*Academic Achievement*", bisa dilihat dari nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Apabila prestasi bagus, tapi ilmu tanpa pengamalan tidak banyak berarti. Untuk itu perlu seimbang, dan setiap pengamalan harus ada ruh Ilahiah agar diperoleh generasi muda yang cerdas, beriman dan berakhlak mulia.

Untuk negara dan kebangsaan Khofifah mengemukakan pandangan bahwa sekarang masyarakat banyak berkotak-kotak, ikhtiar untuk bersatu tetap ada. Dari sisi keagamaan diperlukan "*Ukhuwah Baiyinah Muslimin*" agar tercipta perdamaian. Ada kontraksi antar umat beragama yang dipicu oleh kesenjangan sosial. Untuk itu ia mendukung usaha Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mewujudkan pilar bangsa, yaitu Bhineka Tunggal Ika dan sila pertama tentang keanekaragaman agama untuk sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah perempuan cerdas yang memiliki motto "besok harus lebih baik dari hari ini" menuturkan. *** (Leny Nofianti dan Ellyan Sastraningsih)

